BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Profil Tempat Kerja Praktek

1.1.1 Sejarah Instansi

Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian *Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data*(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I

Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :

- ✓ IPTN
- ✓ PJKA ITB
- ✓ Dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara *(Menpan)* dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara *(Menpan)* tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum

Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu *Unit Pelaksana Daerah yang struktural.*

Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. *Telematika* singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika .

Selanjutnya, berdasarkan *Perda Nomor 21 Tahun 2008* tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi *Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi* Jawa Barat disingkat *DISKOMINFO,* yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

1.1.2 Logo Instansi



Gambar 2-1 Logo Intansi

1.1.3 Badan Hukum Instansi

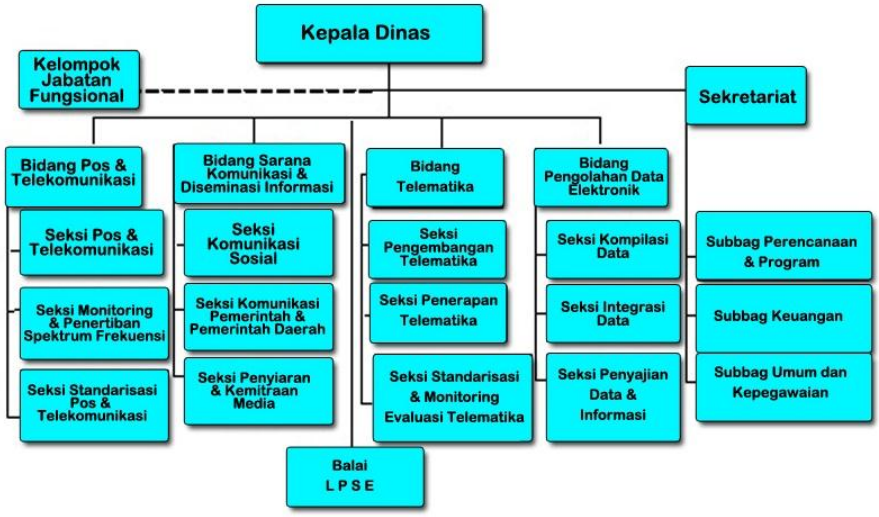
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.1.4 Struktur Organisasi dan Job Description

1.1.4.1 Struktur Organisasi



Gambar 2-2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda, Dinas Komunikasi dan Informatika berada diperingkat 20 dengan sruktur organisasi sebagai berikut di bawah ini.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
   - ✓ Sub.Bagian Perencanaan dan Program
   - ✓ Subbagian Keuangan
   - ✓ Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :
   - ✓ Seksi Pos Dan Telekomunikasi
   - ✓ Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi
   - ✓ Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi
4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :
   - ✓ Seksi Komunikasi Sosial
   - ✓ Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah
   - ✓ Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media
5. Bidang Telematika, membawahkan :
   - ✓ Seksi Pengembangan Telematika

- ✓ Seksi Penerapan telematika
- ✓ Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan :

- ✓ Seksi Kompilasi Data
- ✓ Seksi Integrasi Data
- ✓ Seksi Penyajian Data dan Informasi.

7. Balai LPSE, membawahkan :

- ✓ Tata Usaha LPSE
- ✓ Layanan Informasi LPSE
- ✓ Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Lingkup M-CAP DISKOMINFO

Ruang lingkup M-CAP DISKOMINFO adalah penyebaran informasi dan pendidikan melalui komputer dan layanan internet untuk masyarakat Jawabarat yang dibagi menjadi beberapa kategori seperti Anak – anak, Pelajar, Umum, dan lainnya

1.2.1.1 Fungsi dan peranan

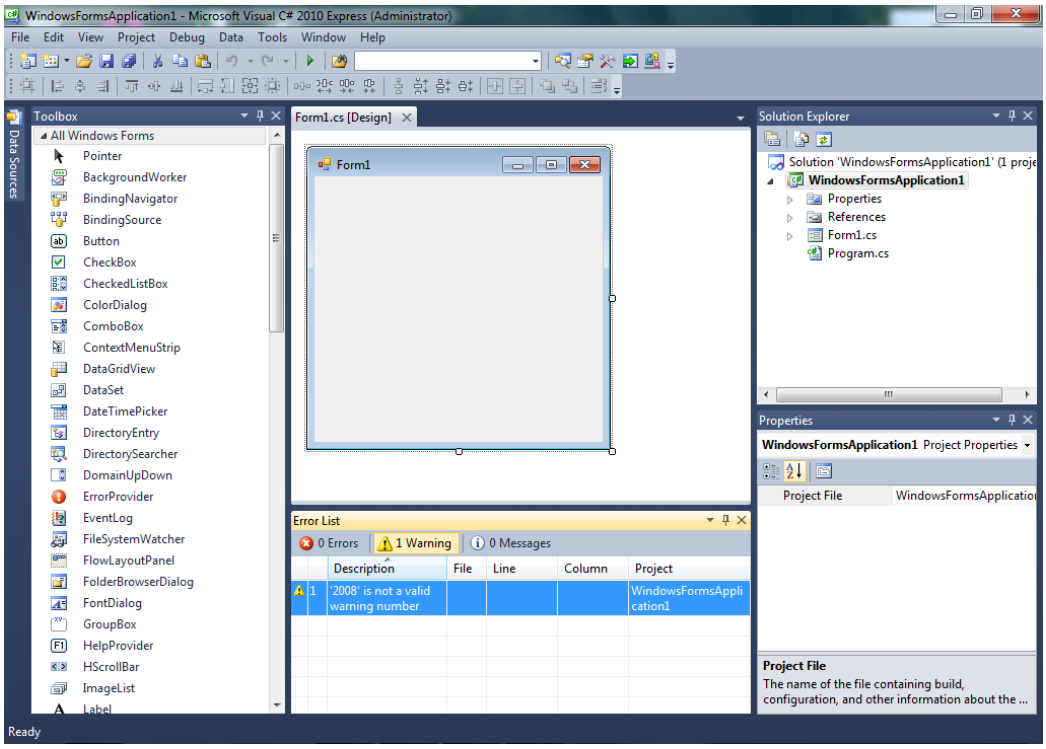
M-CAP (*Mobile Community Access Point*) adalah mobil berisikan komputer dan layanan internet mobile yang ditujukan dalam diseminasi teknologi informasi guna terwujudnya *West Java Cyber Province*. Pada M-CAP disediakan komputer-komputer yang bisa digunakan untuk mengakses semua situs-situs internet. M-CAP juga sering melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan pembelajaran internet.

1.2.2 Microsoft Visual C# 2010

Microsoft Visual C# 2010 atau *Visual C#(C Sharp)* adalah bahasa pemrograman yang bekerja dalam sistem operasi Windows yang merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena menggunakan struktur pemrograman bahasa C. *Visual C#* juga menyediakan berbagai *tools* yang dapat mempermudah dalam membuat suatu aplikasi, diantanya fasilitas *web browser*, yang digunakan untuk membuat *browser*, sehingga akan mempermudah dalam pembuatan *web browser*.

Visual C# mendukung pemrograman berbasis objek atau biasa di sebut OOP(*Object Oriented Programing*) dan memudahkan programmer untuk membuat aplikasi berbasis objek serta mendukung aplikasi berbasis *.NET*. Selain itu, *Visual C#* juga menyediakan fasiltas koneksi ke *database MySQL* dengan menggunakan konektor tambahan sebagai penghubungnya dan mendukung perintah – perintah *MySQL*.

Berikut ini gambar lingkungan kerja pada *Visual C# 2010*:



Gambar 2-3 Tampilan lingkungan kerja Visual C# 2010

1.2.3 MySQL

MySQL adalah aplikasi *SQL database server* yang multi user. Oleh karena itu, *MySQL* digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yang digunakan sebagai *database server* untuk menyimpan data pengunjung yang menggunakan fasilitas komputer dan internet di M-CAP.

MySQL adalah aplikasi *database* yang mudah digunakan karena telah banyak digunakan di berbagai aplikasi dan *websites. MySQL* juga mudah untuk dipadukan dengan aplikasi *Visual C#* karena *MySQL* menyediakan konektor untuk aplikasi pemrograman *.NET* untuk mendukung *MySQL* berjalan dengan baik di *Visual C#.*

1.2.4 Basis data (*Database*)

Basis data atau *database* adalah kumpulan data yang salaing berelasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil

(*Query*) basis data disebut *Database Management System* (DBMS), dan sistem basis data yang dipelajari disebut sistem informasi.

Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan – catatan, atau potongan dan pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan yang tersimpan di dalamnya yang di sebut skema. Skema menggambarkan objek yang dimiliki oleh suatu basis data dan relasi(hubungan) diantaranya. Cara untuk mengorganisasikan skema di sebut Model Basis Data. Ada beberapa Model yang digunakan, akan tetapi yang umum digunakan sekarang adalah Model Relasional.